

**EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023**

(Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)

Skripsi

Oleh

ANISA SYAHRUL MUBAROKAH

NPM 2116021028



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023**

(Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)

Oleh

ANISA SYAHRUL MUBAROKAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023 (Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)

Oleh

Anisa Syahrul Mubarakah

Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik merupakan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah sesuai prinsip tata kelola yang baik. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung telah menerapkan sistem ini sejak 2019. Namun, berdasarkan identifikasi permasalahan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2019-2024, masih terdapat permasalahan prasarana dan sarana yang belum optimal dalam mendukung tugas pokok dan fungsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengadaan barang/jasa berbasis elektronik di Balitbangda Provinsi Lampung tahun 2023. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada tiga indikator efektivitas: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik telah menjadi katalisator peningkatan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan eksternal melalui peran strategis Pejabat Pembuat Komitmen dan dukungan yang memadai. Aspek integrasi menunjukkan keterhubungan baik antar komponen organisasi melalui komunikasi multi-saluran, koordinasi terstruktur, dan pemahaman bersama tentang tujuan sistem. Penelitian menyimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa berbasis elektronik di Balitbangda Provinsi Lampung tahun 2023 telah berjalan efektif. Namun, untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut masih diperlukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan komprehensif, desentralisasi pengetahuan dan tanggung jawab, peningkatan infrastruktur pendukung, penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik ini untuk digitalisasi penuh, serta penguatan evaluasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengadaan Barang/Jasa, Sistem Elektronik.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES IN 2023 (A Study at the Regional Research and Development Agency of Lampung Province)

By

Anisa Syahrul Mubarokah

Electronic procurement of goods and services is an innovation to improve the quality of government services in accordance with the principles of good governance. The Regional Research and Development Agency (Balitbangda) of Lampung Province has implemented this system since 2019. However, based on the identification of problems contained in the 2019-2024 Strategic Plan document, there are still problems with infrastructure and facilities that are not optimal in supporting the main tasks and functions. This study aims to analyze the effectiveness of electronic-based procurement of goods/services at the Balitbangda of Lampung Province in 2023. The study used a qualitative descriptive method with a focus on three indicators of effectiveness: achievement of goals, integration, and adaptation. Data were collected through interviews and documentation. The results of the study show that electronic-based procurement of goods/services has become a catalyst for increasing the efficiency and effectiveness of the procurement process. This electronic-based procurement system shows good adaptability to external changes through the strategic role of the Commitment Making Officer and adequate support. The integration aspect shows good connectivity between organizational components through multi-channel communication, structured coordination, and a shared understanding of system objectives. The study concluded that electronic-based procurement of goods/services in Balitbangda Lampung Province in 2023 has been running effectively. However, to further increase effectiveness, it is still necessary to strengthen human resource capacity through comprehensive training, decentralization of knowledge and responsibility, improvement of supporting infrastructure, improvement of this electronic-based government procurement system for full digitalization, and strengthening of evaluation involving all stakeholders.

Keywords: Effectiveness, Procurement of Goods/Services, Electronics System.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2023 (STUDI DI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG)

Nama Mahasiswa : Anisa Syahrul Mubarakah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116021028

Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
NIP. 197804302008121001

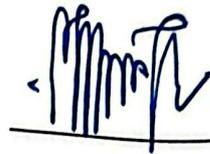
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Tabah Maryanah
NIP 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

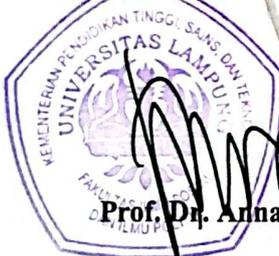
Ketua : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M. IP.



Penguji Utama : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Anisa Syahrul Mubarakah
NPM 2116021028

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anisa Syahrul Mubarakah lahir di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 6 November 2003 dari pasangan Bapak Rusman, S.Pd.I dan Ibu Suratmi. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari bangku Taman Kanak-kanak (TK) yaitu TK Al-Furqon Panaragan Jaya pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar di SDS Islam Al-Furqon Panaragan Jaya pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Jenjang selanjutnya yakni sekolah menengah atas yang ditempuh penulis di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Penulis selanjutnya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2021 dengan tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa kuliah, penulis aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulutangkis Universitas Lampung dan UKM Panahan Universitas Lampung. Pada tahun 2023, pada kedua UKM tersebut penulis diberikan kepercayaan untuk menjadi pengurus inti pada bidang Pelatihan dan Kaderisasi. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Panca Warna, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung. Selanjutnya penulis melaksanakan MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) dalam bentuk Magang selama 1 (satu) semester atau 6 bulan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

(Imam Syafi’i)

“Sesungguhnya seorang mukmin adalah penanggungjawab atas dirinya (karena hendaknya ia senantiasa) mengintrospeksi diri karena Allah semata.”

(Imam Hasan Al-Bashri)

“Kesempatan hanya datang bagi mereka yang mempersiapkannya.”

(Louis Pasteur)

“Knowledge is power, the pursuit of knowledge is a lifelong journey”

(Anisa Syahrul Mubarakah)

PERSEMBAHAN



Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada orang-orang yang berharga dan berarti dalam hidupku:

Ibundaku Suratmi
dan Ayahandaku Tercinta Alm. Rusman, S.Pd.I Sebagai tanda bakti dan cintaku.
Terimakasih telah memberikan yang terbaik, memberikan kasih sayang, kepercayaan dan doa yang selalu mengalir dimanapun penulis berada. Semoga karya ini dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan

Kakak-Kakakku Tersayang

Nofita Syarah Rosti, Anas Ahmad Rofiq, dan Sahli Khoirul Anwar
Kepada seluruh keluarga dan sahabatku. Terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, doa, serta perhatiannya.

Terimakasih untuk seluruh dosen, staff dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 (Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)”**. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Allah SWT, sang maha segalanya yang hingga hari ini semua makhluk nya tiada berarti tanpa ridho dan anugerah dari-Nya
2. Kepada perempuan yang bekerja sebagai pedagang di kampung bernama Suratmi, ditinggal suaminya pada akhir 2024 lalu. Perempuan itu ibuku, Suratmi namanya. Keningnya menempel di atas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari peranannya. Hanya seuntai do'a yang dapat penulis berikan, *“jazakumullah katsir”* semoga Allah SWT membalas segala amal kebajikannya dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin
3. Kepada lelaki kuat almarhum Rusman, Ayahku. Yang sudah meninggal belum sempat saya berikan kebahagiaan rasa bangga, belum melihat anak kesayangannya menyelesaikan pendidikan terakhir dan menemani sampai

wisuda. Ayah kepergianmu cukup membuatku terpukul hingga anakmu ini sempat kehilangan arah. Ayah banyak yang ingin saya ceritakan kepadamu, doaku selalu kulayangkan untukmu. Ayah tolong muncul didalam mimpiku aku ingin sekali memelukmu walau itu hanya dalam mimpi. Ayah terima kasih

4. Ketiga kakakku Nofita Syarah Rosti, Anas Ahmad Rofiq, dan Sahli Khoirul Anwar yang telah menjadi pendengar yang baik dikala susah, terimakasih atas doa, dukungan, dan support yang telah diberikan selama ini untuk menjadikan diri ini menjadi pribadi yang lebih baik
5. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
6. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan
9. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah banyak memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak bapak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.
10. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis
11. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku pembahas dan penguji utama yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik
12. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
13. Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dan informan saya, Bapak Sultan Hasanuddin, Ibu Dian Sera Fauzela, Ibu Meira Mutiara Dona, Ibu Nia Kurniati, Ibu Putri Kartarina, Ibu Syahlely Agustiana,

Bapak Yusuf Ananda, dan Bapak Senna Sulaiman, yang telah bersedia meluangkan waktu dan juga tempat untuk saya sehingga saya dapat berdiskusi dan mendapatkan informasi untuk mendapatkan hasil wawancara. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, Aamiin

14. Nadira dan Isma selaku sahabat penulis yang seringkali direpotkan setiap saat. terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, semangat, dan tawa yang selalu mengiringi setiap langkahku. Di tengah perjalanan yang penuh tantangan ini, kehadiran kalian menjadi penyemangat yang tak ternilai. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan harapan. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tetapi juga keluarga yang dipilih oleh hati
15. Kepada Gianin dan Elsa, sahabat seperjuangan dalam bimbingan yang tak pernah lelah memberikan semangat, terima kasih atas kebersamaan yang tulus, atas tawa yang menguatkan, dan doa yang diam-diam menyatu dalam setiap langkah. Dalam proses bimbingan di bawah arahan dosen yang sama, kita tidak hanya berbagi ruang diskusi dan jadwal revisi, tetapi juga berbagi semangat, kelelahan, dan harapan. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, teman saling mengingatkan, dan teman seperjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita sama-sama sampai di garis akhir dengan rasa bangga, bukan hanya karena gelar yang kita raih, tetapi karena perjuangan dan proses yang telah kita lewati bersama.
16. Anggota fansev, Syafira, Heri, Yoga, Raihan, Dominggus Apriyan, Paul, teman-teman UKM Bulutangkis dan UKM Panahan Unila, serta teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Terima kasih atas persahabatan, doa, dukungan serta kebersamaan selama proses perkuliahan. Semoga kita semua sukses. Aamiin
17. Anggota ISTIGFAR, Nia, Rika, Ferisna, Kiki, Jheni, dan Finca, sahabatku sejak 7 tahun lalu. Semoga kita bisa selalu menguatkan dalam menggapai mimpi, terimakasih atas doa dan dukungannya
18. Teman-teman KKN saya di Kabupaten Mesuji Kecamatan Way Serdang Desa Panca Warna, Billa Agustina, Ega Julianingsih, Bima, Ilham, Sidiq, dan Sindy Amarda yang telah menjadi teman mengukir cerita selama 40 hari

lamanya. Semoga pertemanan kita bisa terus berlanjut walaupun terhalang jarak dan waktu.

19. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *lauhul mahfudz* untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat.”
20. *Last but not least*. Terimakasih untuk Anisa Syahrul Mubarakah, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin

Bandar Lampung, 13 Juni 2025
Penulis,

Anisa Syahrul Mubarakah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Efektivitas	13
2.1.1 Pengertian Efektivitas	13
2.1.2 Indikator Efektivitas	14
2.2 Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa	23
2.3 Tinjauan <i>E-Procurement</i>	26
2.4 Kerangka Pikir	27
III METODE PENELITIAN	30
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Informan Penelitian	33
3.4 Lokasi Penelitian	34
3.5 Jenis Data	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Pengolahan Data	36
3.8 Teknik Analisis Data	38
3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39

IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
	4.1 Efektivitas pada Aspek Pencapaian Tujuan	40
	4.1.1 Dimensi Orientasi Waktu	41
	4.1.2 Dimensi Standar Pengukuran	48
	4.1.3 Dimensi Dukungan Sumber Daya	55
	4.2 Efektivitas pada Aspek Adaptasi	60
	4.2.1 Dimensi Respon Perubahan Eksternal	60
	4.2.2 Dimensi Inovasi Proses dan Sistem	66
	4.2.3 Dimensi Pembelajaran Berkelanjutan	71
	4.3 Efektivitas Integrasi	78
	4.3.1 Dimensi Komunikasi Efektif	78
	4.3.2 Dimensi Strategi Antar Unit	84
	4.3.3 Dimensi Keselarasan Tujuan	88
V	Simpulan dan Saran	103
	5.1 Simpulan	103
	5.2 Saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Paket Penyedia Balitbangda Tahun 2023	5
2. Penelitian Terdahulu	8
3. Informan Penelitian	34
4. Keterangan Pengambilan Data Primer	35
5. Keterangan Pengambilan Data Sekunder	35
6. Tingkat Pendidikan SDM Balitbangda Provinsi Lampung	56
7. Triangulasi Data Penelitian	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Pikir	28
2. Surat Pesanan Bidang IPTEK	44
3. Tampilan E-Katalog versi 5.0 dalam akun Penyedia	53
4. Perwakilan Balitbangda dalam Rapat Pembinaan Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui <i>E-Purchasing</i>	64
5. <i>Live Testing</i> dan Bimbingan Teknis E-Katalog Versi 5 Tahun 2023	69
6. Materi Pelatihan <i>E-Procurement</i> Balitbangda Provinsi Lampung	75
7. PA, PPK, dan Penyedia Barang. Rapat mengenai Optimalisasi Pengadaan Barang di lingkungan Balitbangda, 20 Maret 2023	82
8. Instruksi Kepala Badan Mengenai Perencanaan Target Pengadaan Barang/Jasa tahun 2023	87
9. Keselarasan Tujuan Balitbangda Provinsi Lampung	91

DAFTAR SINGKATAN

Balitbangda	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SIRUP	: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
SDM	: Sumber Daya Manusia
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digitalisasi yang semakin pesat, penggunaan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah mengalami transformasi digital adalah sistem pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang memiliki dampak langsung terhadap efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik (Indrajit, 2016).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan akan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah Indonesia telah menginisiasi sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau yang dikenal dengan *E-Procurement*. Implementasi *E-Procurement* ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang telah menjadi agenda prioritas pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Melalui penerapan *E-Procurement*, diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik kecurangan, mengoptimalkan efisiensi anggaran, serta meningkatkan persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan pemerintah (Kementrian PANRB, 2016).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP terus berupaya menciptakan sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih maju, sistematis, dan terintegrasi dengan tujuan untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa. Melalui sistem pengadaan digital (katalog elektronik), harga yang ada di pasar dapat dengan mudah diperoleh dan dicek kapan saja, sehingga dapat membantu

kita sebagai pengelola pengadaan dalam merumuskan metodologi apa yang tepat sesuai dengan kondisi pasar.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan melalui forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan 2023, digitalisasi pengadaan adalah upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam belanja pemerintah.

“(dengan pengadaan secara elektronik) kita memastikan (adanya) transparansi dan efisiensi belanja, serta mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa. Tujuannya adalah mewujudkan ekonomi yang inklusif,” kata Sarah dalam Talkshow Rakornas Pengadaan 2023 pada Rabu (8/11) (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023)

Namun meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan, Listiyanto (2012) mengatakan, regulasi yang berkaitan dengan PBJ masih lemah terutama pada mekanisme pelaksanaannya, sehingga kualitas barang yang dihasilkan tidak sesuai, adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) antara pejabat dan penyedia. Hal ini terbukti hingga akhir tahun 2023 KPK telah menangani 161 perkara korupsi, dimana 62 kasus terjadi pada sektor penyediaan barang/jasa sehingga menempatkan kasus PBJ terbanyak kedua setelah kasus penyuapan. *Indonesia Procurement Watch (IPW)* juga mengatakan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pertama, hukum yang masih lemah; kedua, kapasitas pengelola pengadaan barang/jasa yang masih lemah; ketiga, kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan, dan penegakannya yang masih lemah (Amiruddin, 2012). Selain masalah regulasi yang masih lemah, terdapat tiga celah korupsi yang dapat menyebabkan terjadi korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa yaitu pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan KPK, dimana didapatkan bahwa tingginya kasus korupsi pada penyediaan barang/jasa

dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Permasalahan yang terjadi pada tahap perencanaan yaitu tidak transparansi yang menyebabkan tidak termonitornya besaran dan realisasi jumlah anggaran pengadaan barang/jasa serta penyimpangan perencanaan penyediaan PBJ yang tidak terdeteksi secara dini. Menurut Nayabarani (2017) transparan dalam proses pengadaan barang/jasa dapat mencegah terjadinya korupsi, sehingga hal hal yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi dapat diminimalisir. Dalam hal ini, untuk mencegah terjadinya korupsi perlu menerapkan prinsip prinsip dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Dengan adanya pernyataan diatas mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai efektivitas pengadaan barang/jasa itu sendiri karena pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan penting dalam mendukung kelancaran operasional pemerintah, termasuk lembaga strategis seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Efektivitas pengadaan barang/jasa sangat memengaruhi kinerja lembaga pemerintahan, terutama dalam hal penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan tepat waktu, berkualitas, dan sesuai anggaran. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik atau dikenal dengan *E-Procurement*. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir kendala yang sering terjadi dalam pengadaan konvensional, seperti birokrasi yang berbelit-belit, keterlambatan pengiriman, serta potensi korupsi (Wibowo, 2019)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 hadir sebagai penyempurnaan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem pengadaan pemerintah. Perubahan utama dalam regulasi ini menekankan pada penguatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, dimana pemerintah mewajibkan

penggunaan produk lokal serta memberikan porsi lebih besar bagi pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan. Penyederhanaan prosedur pengadaan juga menjadi fokus utama dengan mengoptimalkan penggunaan *E-Marketplace* dan memberikan fleksibilitas dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan.

Meskipun penerapan *E-Procurement* memiliki berbagai keunggulan, pelaksanaannya di lingkungan pemerintahan, termasuk di Provinsi Lampung, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Selain itu, keterampilan dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem pengadaan berbasis elektronik juga masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Pengalaman menunjukkan bahwa implementasi teknologi baru sering kali memerlukan waktu untuk diadopsi dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan (Amiruddin, 2021)

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam Renstra Balitbangda tahun 2019-2024, terdapat masalah yakni prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pengadaan barang/jasa berbasis elektronik di Balitbangda Provinsi Lampung berperan penting dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi tugas utama lembaga ini. Efektivitas pengadaan barang/jasa berbasis elektronik berhubungan langsung dengan kualitas penelitian yang dihasilkan. Jika proses pengadaan berjalan lambat atau tidak efisien, hal ini dapat menghambat jalannya kegiatan penelitian yang membutuhkan dukungan logistik dan peralatan tepat waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan *e-procurement* di Balitbangda, terutama dalam mendukung kelancaran program-program penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah (Purwanto, 2020)

Dengan penerapan *E-Procurement* pada barang/jasa Balitbangda Provinsi Lampung, maka berdasarkan data pada website balitbangda.lampungprov.go.id pada tahun 2023, terdapat 63 paket penyedia dengan total pagu 761.321.318 dan swakelola terdapat 67 paket

dengan total pagu 3.985.309.200. pada paket penyedia, terdapat rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Paket Penyedia Balitbangda tahun 2023

No.	Nama Paket	Pagu	Jenis Pengadaan
	BARANG		
1.	4 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.524.400	Barang
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	Barang
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.455.600	Barang
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.624.300	Barang
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.906.450	Barang
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.493.600	Barang
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.312.400	Barang
8.	Belanja Modal Alat Pendingin	26.271.000	Barang
9.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	81.254.500	Barang
10.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	63.048.000	Barang
11.	Belanja Modal Personal Computer	30.000.000	Barang
12.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.275.000	Barang
13.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.500.000	Barang
14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.955.700	Barang

15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.750.700	Barang
16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.634.000	Barang
17.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.230.200	Barang
18.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.359.084	Barang
19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.507.300	Barang
20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.570.400	Barang
21.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.890.000	Barang
22.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.008.800	Barang
23.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.178.800	Barang
24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.114.900	Barang
25.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.365.800	Barang
26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.788.500	Barang
27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.746.800	Barang
28.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.989.100	Barang
29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.206.200	Barang
30.	Fotocopy Folio	380.000	Barang
31.	Fotocopy Folio	1.361.200	Barang
32.	Jilid Biasa	112.500	Barang
33.	Jilid Biasa	150.000	Barang
34.	Jilid Tertentu	150.000	Barang
35.	Jilid Tertentu	200.000	Barang
36.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.523.400	Barang

37.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.426.800	Barang
38.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.711.600	Barang
39.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.568.200	Barang
40.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	99.000.000	Barang
41.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.572.600	Barang
42.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.661.000	Barang
43.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.764.000	Barang
44.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.212.000	Barang
45.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.761.900	Barang
46.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.398.000	Barang
47.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.646.000	Barang
48.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.400.000	Barang
49.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000	Barang
50.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.858.600	Barang
51.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.854.584	Barang
52.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.308.000	Barang
53.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.905.384	Barang
54.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.540.000	Barang
55.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.032.616	Barang
56.	Cetak Buku + Jilid Cover 1 -	2.000.000	Barang

	50 lembar/halaman		
57.	Cetak hard cover laporan	2.000.000	Barang
58.	Cetak hard cover laporan	2.000.000	Barang
59.	Cetak hard cover laporan	2.000.000	Barang
60.	Fotocopy Folio	5.171.400	Barang
61.	Cetak hard cover laporan	1.500.000	Barang
	JASA LAINNYA		
62.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.450.000	Jasa Lainnya
63	Belanja Tagihan Listrik	93.240.000	Jasa Lainnya
Total		761.321.318	

(Sumber : www.balitbangda.lampungprov.go.id)

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai berikut :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Deskripsi
1.	Kathryn & Rohendi, 2019	Pengaruh Penerapan <i>E-Procurement</i> Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Penelitian ini berfokus pada pengaruh penerapan <i>e-procurement</i> terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan implikasinya terhadap penyerapan anggaran belanja modal sebagai variabel intervening di Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2.	Umar et al., 2021	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020	Penelitian ini berfokus pada Permasalahan yang terjadi yaitu keterlambatan penyampaian informasi lelang yang mau di tenderkan, transparansi penyelenggaraan lelang dan penerimaan tender, serta adanya pengunduran pengumuman pemenang tender dari lelang barang dan jasa yang diselenggarakan dalam proses <i>e-</i>

			<i>procurement</i> di Kabupaten Bener Meriah.
3.	Iwan Irwansyah et al., 2022	Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (<i>E-Procurement</i>) di Kelurahan Cakung Barat	Penelitian ini berfokus pada Ancaman dapat terjadi berupa bahaya terhadap aktifitas pengadaan barang dan jasa seperti kemungkinan terjadinya suatu kesalahan dalam mengatur pengadaan barang dan jasa, kesalahan dalam menentukan pemenang perolehan, kesalahan dalam menerapkan prosedur pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. Selain ancaman untuk pekerjaan dan aktifitas pengadaan barang dan jasa, ancaman juga terjadi dalam aplikasi <i>e-procurement</i> seperti kehilangan informasi, ancaman programmer, dan sebagainya.
4	Ariesta, 2021	Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui <i>E-Catalogue</i> di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan	Penelitian ini berfokus kepada <i>e-catalogue</i> sebagai salah satu komponen dalam <i>e-procurement</i> pada kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan
5.	Hikmah & Irjayanti, 2023	Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan <i>E-Procurement</i> dalam penyediaan barang/jasa dan kaitannya dengan efektivitas proses, serta mengidentifikasi factor keberhasilan dan kegagalan penerapan <i>E-Procurement</i> . Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pengadaan barang/jasa secara elektronik (<i>E-</i>

			<i>Procurement</i>) di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari data primer berupa observasi, wawancara, dan arsip data. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data publikasi lainnya.
--	--	--	---

(sumber : diolah oleh peneliti, 2024)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berfokus pada Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian selanjutnya yaitu berjudul Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Procurement* di Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020 yang berfokus pada Permasalahan yang terjadi yaitu keterlambatan penyampaian informasi lelang yang mau di tenderkan, transparansi penyelenggaraan lelang dan penerimaan tender, serta adanya pengunduran pengumuman pemenang tender dari lelang barang dan jasa yang diselenggarakan dalam proses *e-procurement* di Kabupaten Bener Meriah.

Penelitian selanjutnya yang berjudul Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kelurahan Cakung Barat. Penelitian ini berfokus pada Ancaman dapat terjadi berupa bahaya terhadap aktifitas pengadaan barang/jasa seperti kemungkinan terjadinya suatu kesalahan dalam mengatur pengadaan barang/jasa, kesalahan dalam menentukan pemenang perolehan, kesalahan dalam menerapkan prosedur pengadaan barang/jasa dan lain sebagainya. Selain ancaman untuk pekerjaan dan aktifitas pengadaan barang/jasa, ancaman juga terjadi dalam ap-

likasi *E-Procurement* seperti kehilangan informasi, ancaman programmer, dan sebagainya. Penelitian selanjutnya yang berjudul Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Catalogue* di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus kepada *E-Catalogue* sebagai salah satu komponen dalam *E-Procurement* pada kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini baik secara fokus penelitian tempat, teori yang digunakan dan yang akan diteliti. Balitbangda Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian untuk studi efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah karena beberapa alasan yang mendasar. Pertama, lembaga ini memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, sehingga efektivitas pengadaan barang/jasa menjadi krusial untuk memastikan kelancaran program-program strategisnya. Kedua, Balitbangda telah mengadopsi sistem pengadaan berbasis elektronik (*e-procurement*) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memberikan peluang untuk mengevaluasi implementasi sistem tersebut. Ketiga, kompleksitas kebutuhan pengadaan di Balitbangda, yang meliputi peralatan penelitian, bahan habis pakai, dan jasa konsultasi, menjadikannya studi kasus yang menarik. Penelitian ini juga relevan dengan kebijakan nasional dalam mendorong good governance melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Terakhir, efektivitas pengadaan barang/jasa di lembaga ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas penelitian dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, yang pada akhirnya berpengaruh pada pelayanan publik di Provinsi Lampung. Dengan pertimbangan tersebut, Balitbangda Provinsi Lampung menjadi lokasi yang tepat dan relevan untuk penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengadaan barang/jasa berbasis elektronik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan pemerintahan, dalam hal khususnya ilmu pemerintahan, memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan *e-procurement* pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Bahan informasi dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa dalam memahami Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Efektifitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam manajemen dan evaluasi kinerja. Secara umum, efektivitas merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Namun, para ahli memiliki perspektif yang sedikit berbeda dalam mendefinisikan dan mengukur efektivitas.

Saksono (1984) melihat efektivitas sebagai tingkat kelekatan antara output yang dicapai dengan output yang diharapkan. Konsep ini menekankan pentingnya kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan ekspektasi atau rencana awal. Saksono juga mempertimbangkan input dalam definisinya, yang menunjukkan bahwa efektivitas bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Ini menambahkan dimensi efisiensi ke dalam konsep efektivitas.

Mahmudi (2005) memperluas konsep efektivitas dengan menekankan hubungan antara output dan tujuan. Dalam pandangan ini, efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa banyak output yang dihasilkan, tetapi juga seberapa besar kontribusi output tersebut terhadap pencapaian tujuan. Definisi ini menambahkan nuansa penting dalam pemahaman efektivitas, yaitu bahwa kuantitas output saja tidak cukup; output tersebut harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti bahwa kegiatan yang menghasilkan banyak output tetapi tidak relevan dengan tujuan organisasi tidak bisa dianggap efektif.

Mardiasmo (2009) menekankan hubungan antara efektivitas dan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Ia menyebut ini sebagai "hasil guna". Mardiasmo juga menekankan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

2.1.2 Indikator Efektivitas

Menurut Duncan, (2012) Efektivitas organisasi dapat diukur melalui tiga indikator utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Pertama, pencapaian tujuan (goal attainment) yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, adaptasi (adaptation) yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Ketiga, integrasi (integration) yang mencerminkan tingkat keterpaduan dan koordinasi antar bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

1. Pencapaian Tujuan

pencapaian tujuan merupakan proses keseluruhan dari upaya pencapaian tujuan organisasi. Indikator ini menekankan pentingnya tahapan dalam mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Dalam prosesnya, pencapaian tujuan memperhatikan kurun waktu yang telah ditentukan serta sasaran yang menjadi target konkret. Keberhasilan pencapaian tujuan dapat dilihat dari kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang direncanakan, ketepatan waktu penyelesaian, serta persentase keberhasilan program yang dijalankan.

Richard Steers (2015) menambahkan bahwa pencapaian tujuan harus jelas, terukur, relevan, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dibatasi oleh waktu tertentu.

a. Berorientasi pada jangka waktu

Dimensi pertama dalam konsep pencapaian tujuan menurut

Richard Steers adalah orientasi waktu, yang merupakan aspek fundamental dalam perencanaan dan pelaksanaan tujuan organisasi. Orientasi waktu ini memberikan kerangka temporal yang sistematis untuk mengatur, mengelola, dan mengevaluasi berbagai target organisasi dalam periode waktu yang berbeda. Dalam implementasinya, orientasi waktu terbagi menjadi tiga kategori utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Kategori pertama adalah tujuan jangka pendek (*Short-term goals*) yang mencakup periode waktu 1-12 bulan. Tujuan ini berfokus pada aktivitas operasional dan taktis yang bersifat segera dan rutin. Karakteristik utama dari tujuan jangka pendek adalah sifatnya yang mudah diukur dan dievaluasi, memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian dan tindakan korektif dengan cepat. Target-target bulanan dan kuartalan menjadi instrumen utama dalam pencapaian tujuan jangka pendek, memberikan gambaran konkret tentang progres organisasi dalam mencapai sasaran operasionalnya.

Selanjutnya, tujuan jangka menengah (*Medium-term goals*) yang memiliki rentang waktu 1-3 tahun merupakan kategori kedua dalam orientasi waktu. Periode ini memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan kapabilitas organisasi secara lebih sistematis dan terencana. Tujuan jangka menengah membutuhkan perencanaan yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai skenario dan pertimbangan, serta memerlukan keterlibatan lebih banyak pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kemampuan organisasi, pengembangan sistem dan prosedur, serta pembangunan infrastruktur pendukung

yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Kategori ketiga adalah tujuan jangka panjang (*Long-term goals*) yang mencakup periode 3-5 tahun atau lebih. Tujuan ini bersifat strategis dan erat kaitannya dengan visi serta misi organisasi. Dalam tujuan jangka panjang, organisasi perlu mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan makro seperti tren industri, perkembangan teknologi, perubahan demografis, serta faktor ekonomi dan politik. Perencanaan jangka panjang ini juga mencakup aspek transformasi organisasi, positioning di pasar, serta pengembangan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi orientasi waktu dalam pencapaian tujuan sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk menyelaraskan ketiga kategori waktu tersebut. Tujuan jangka pendek harus mendukung pencapaian tujuan jangka menengah, yang pada gilirannya berkontribusi pada realisasi tujuan jangka panjang. Integrasi yang efektif antara ketiga kategori waktu ini memungkinkan organisasi untuk mempertahankan fokus pada operasional harian sambil tetap bergerak menuju sasaran strategis jangka panjangnya.

b. Memiliki standar pengukuran yang jelas

Dimensi kedua dari konsep pencapaian tujuan menurut Richard Steers adalah standar pengukuran yang terdiri dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Kedua aspek ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi secara komprehensif.

Aspek kuantitatif dalam standar pengukuran menekankan pada penggunaan data-data yang dapat dihitung dan diukur

secara matematis. Pengukuran berbasis angka dan statistik ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja organisasi melalui analisis trend dan pola yang teridentifikasi dari data historis. Implementasi Key Performance Indicators (KPI) menjadi instrumen utama dalam pengukuran kuantitatif, di mana setiap indikator memiliki target spesifik yang harus dicapai dan dapat dibandingkan dengan standar industri. Keunggulan pengukuran kuantitatif terletak pada objektivitasnya, karena berdasarkan pada data faktual yang dapat diverifikasi dan menggunakan standar yang konsisten dalam proses evaluasinya.

Sementara itu, aspek kualitatif dalam standar pengukuran berfokus pada penilaian yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik secara langsung. Penilaian kualitatif dilakukan melalui observasi mendalam terhadap berbagai aspek perilaku dan kinerja organisasi. Proses evaluasi melibatkan pengumpulan feedback dari berbagai stakeholder melalui mekanisme seperti survei kepuasan, wawancara, dan diskusi kelompok terarah. Aspek-aspek non-numerik yang menjadi fokus penilaian kualitatif mencakup budaya organisasi, kualitas layanan yang diberikan, serta dampak sosial yang dihasilkan dari aktivitas organisasi.

Integrasi kedua aspek pengukuran ini sangat penting dalam memberikan penilaian yang komprehensif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Aspek kuantitatif memberikan data konkret dan terukur, sementara aspek kualitatif menyediakan pemahaman mendalam tentang konteks dan dampak dari pencapaian tersebut. Kombinasi keduanya memungkinkan organisasi untuk tidak hanya mengetahui

sejauh mana target-target numerik telah tercapai, tetapi juga memahami kualitas dari pencapaian tersebut serta dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan.

c. Didukung sumber daya yang memadai

Dimensi ketiga dari konsep pencapaian tujuan menurut Richard Steers adalah dukungan sumber daya yang terdiri dari tiga elemen utama yang saling terkait dan mendukung efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya.

Elemen pertama adalah sumber daya manusia (SDM) yang merupakan aset penting dalam organisasi. Aspek kompetensi dan keahlian menjadi fokus utama dalam pengembangan SDM, dimana setiap personel harus memiliki keterampilan teknis yang sesuai dengan tugasnya, soft skills yang mendukung kolaborasi dan komunikasi efektif, serta pengalaman profesional yang relevan. Jumlah personel yang memadai juga menjadi pertimbangan penting, dimana organisasi harus memastikan rasio karyawan dan beban kerja yang seimbang, distribusi tenaga kerja yang efektif, serta struktur organisasi yang mendukung. Program pengembangan SDM berkelanjutan dilaksanakan melalui pelatihan regular, manajemen talenta yang terencana, serta succession planning yang matang untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan organisasi.

Elemen kedua adalah sumber daya material yang menyediakan dukungan fisik dan finansial bagi operasional organisasi. Infrastruktur dan fasilitas mencakup ketersediaan gedung, peralatan kerja, dan sarana pendukung yang memadai serta sistem pemeliharaan yang teratur. Teknologi pendukung meliputi implementasi sistem informasi yang

terintegrasi, perangkat keras dan lunak yang updated, serta otomatisasi proses untuk meningkatkan efisiensi operasional. Anggaran operasional yang mencukupi menjadi penting dalam mendukung aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya alokasi dana yang tepat, manajemen keuangan yang efektif, serta upaya-upaya efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas.

Elemen ketiga adalah sumber daya informasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi memungkinkan organisasi untuk memiliki database terpadu, sistem pelaporan yang efektif, serta monitoring real-time terhadap berbagai aktivitas organisasi. Database yang terintegrasi menjamin ketersediaan data yang terpusat, sistem backup yang reliable, serta keamanan data yang terjamin. Kemudahan akses terhadap data yang relevan memungkinkan sharing informasi yang efektif antar bagian dalam organisasi serta update berkala terhadap informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

2. Adaptasi

adaptasi menunjukkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Indikator ini mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, penggunaan teknologi baru untuk mendukung operasional, serta responsivitas terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Adaptasi juga meliputi kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi untuk menghadapi dinamika perubahan.

Menurut Robbins (2013), adaptasi merupakan kemampuan or-

ganisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Konsep adaptasi ini dapat dijelaskan melalui tiga indikator utama yang saling berkaitan dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi.

a. Respon perubahan eksternal

Indikator pertama adalah kemampuan merespon perubahan eksternal, yang mencerminkan bagaimana organisasi dapat mengenali, menganalisis, dan merespon berbagai perubahan di lingkungan eksternal secara efektif. Kemampuan ini meliputi monitoring berkelanjutan terhadap tren pasar, perubahan preferensi konsumen, perkembangan teknologi, serta dinamika kompetisi dalam industri. Organisasi yang adaptif harus mampu mengembangkan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi perubahan yang signifikan, melakukan analisis dampak terhadap organisasi, serta merumuskan strategi respons yang tepat dan tepat waktu dalam menghadapi perubahan tersebut.

b. Inovasi proses dan sistem

Indikator kedua adalah inovasi dalam proses dan sistem, yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk terus memperbarui dan meningkatkan cara kerjanya. Inovasi ini mencakup pengembangan metode kerja baru, implementasi teknologi terkini, serta penyempurnaan sistem manajemen yang ada. Organisasi perlu mendorong budaya inovasi yang memungkinkan setiap anggota organisasi berkontribusi dalam pengembangan ide-ide baru dan perbaikan berkelanjutan. Proses inovasi ini juga meliputi evaluasi dan penyempurnaan prosedur operasional, pengembangan produk dan layanan baru, serta implementasi sistem manajemen yang lebih efisien.

c. Pembelajaran berkelanjutan

Indikator ketiga adalah pembelajaran organisasi berkelanjutan, yang menekankan pentingnya organisasi untuk terus belajar dan berkembang. Pembelajaran organisasi ini melibatkan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan baru untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini mencakup pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan, berbagi pengetahuan antar anggota organisasi, serta dokumentasi dan implementasi pembelajaran dari pengalaman organisasi. Pembelajaran berkelanjutan ini memungkinkan organisasi untuk terus meningkatkan kapabilitasnya dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

3. Integrasi

Integrasi adalah kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi dan membangun komunikasi yang efektif. Indikator ini mengukur tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, mengembangkan konsensus, dan menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Aspek yang diperhatikan dalam integrasi meliputi proses sosialisasi dalam organisasi, tingkat kepercayaan dan kerja sama antar anggota, efektivitas komunikasi antar bagian, serta pengelolaan konflik yang mungkin muncul dalam organisasi.

Gibson (2014) menjelaskan bahwa integrasi dalam organisasi terdiri dari tiga elemen penting yang saling terkait dalam menciptakan kesatuan dan keharmonisan organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif.

a. Komunikasi efektif

Elemen pertama adalah komunikasi yang efektif, yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan integrasi organisasi. Komunikasi efektif mencakup aliran informasi yang lancar baik secara vertikal maupun horizontal dalam struktur organisasi. Hal ini meliputi penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu, mekanisme feedback yang berjalan baik, serta penggunaan berbagai saluran komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Komunikasi efektif juga mencakup aspek transparansi dalam penyampaian informasi, keterbukaan dalam menerima masukan, serta kemampuan mengelola konflik melalui dialog yang konstruktif. Organisasi perlu membangun sistem komunikasi yang mendukung kolaborasi antar bagian dan memastikan setiap anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan arah organisasi.

b. Sinergi antar unit

Elemen kedua adalah sinergi antar unit yang menggambarkan bagaimana berbagai bagian dalam organisasi dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi ini tercipta melalui koordinasi yang efektif antar departemen, pembagian sumber daya yang optimal, serta kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas lintas fungsi. Organisasi perlu membangun mekanisme koordinasi yang jelas, mendorong kerja sama tim, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kolaborasi antar unit. Sinergi yang baik juga ditandai dengan adanya pemahaman tentang peran dan kontribusi masing-masing unit dalam mencapai tujuan organisasi, serta kemampuan untuk mengoptimalkan kekuatan masing-masing unit untuk kepentingan bersama.

c. Keselarasan tujuan

Elemen ketiga adalah keselarasan tujuan individu dan organisasi yang menekankan pentingnya menyelaraskan aspirasi dan kepentingan individu dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Keselarasan ini dapat dicapai melalui sistem manajemen kinerja yang efektif, program pengembangan karir yang jelas, serta sistem penghargaan yang adil dan sesuai dengan kontribusi individu. Organisasi perlu memastikan bahwa setiap anggota memahami bagaimana peran mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi mereka sejalan dengan arah pengembangan organisasi.

2.2 Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa merupakan proses penting dalam manajemen keuangan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan utama pengadaan barang/jasa adalah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dengan memastikan bahwa barang/jasa yang dibeli memenuhi standar kualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang tersedia (Perpres Nomor 12, 2021).

Menurut Mahmudi (2010), Pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa tersebut. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam rangka penyediaan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau lembaga. Proses pengadaan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan pembelian atau pembayaran saja, tetapi mencakup serangkaian kegiatan yang dimulai sejak tahap perencanaan hingga seluruh proses selesai dilaksanakan.

Jenis Pengadaan berupa Barang (B), Pekerjaan Konstruksi (PK), Konsultasi (JK), dan Jasa Lainnya (JL). Barang (B) adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pekerjaan Konstruksi (PK) adalah keseluruhan/sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Agus, 2018).

Barang (B) mencakup setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contohnya meliputi peralatan kantor, bahan habis pakai, kendaraan dinas, atau perangkat teknologi informasi. Pengadaan barang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya (*Ibid*).

Pekerjaan Konstruksi (PK) adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jenis pengadaan ini biasanya melibatkan proyek fisik, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya. Pekerjaan konstruksi memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan koordinasi antar pihak untuk memastikan proyek selesai sesuai dengan spesifikasi, waktu, dan anggaran yang

ditetapkan (*Ibid*).

Konsultansi (JK) merujuk pada pengadaan jasa yang melibatkan tenaga ahli atau konsultan untuk memberikan saran, analisis, atau rekomendasi dalam bidang tertentu. Contohnya meliputi jasa konsultansi manajemen, teknik, hukum, atau lingkungan. Jenis pengadaan ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang memerlukan keahlian khusus atau analisis mendalam sebelum pelaksanaan fisik (Agus, 2018).

Jasa Lainnya (JL) mencakup berbagai jenis jasa selain konsultansi dan pekerjaan konstruksi. Contohnya meliputi jasa pemeliharaan, jasa pelatihan, jasa transportasi, atau jasa kebersihan. Pengadaan jasa lainnya bertujuan untuk mendukung operasional instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien (*Ibid*)

Pengadaan barang dan jasa dalam konteks ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi yang dilakukan melalui mekanisme formal dengan memperhatikan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif serta akuntabel.

Keseluruhan proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi administrasi, teknis, maupun keuangan. Hal ini berarti setiap tahapan dalam proses pengadaan harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang. Definisi ini juga menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari pengelolaan keuangan dan aset suatu instansi atau lembaga.

2.3 Tinjauan *E-Procurement*

Saat ini, dalam manajemen pengadaan pemerintah terdapat sebuah aplikasi pendukung proses administrasi, aplikasi tersebut disebut *Electronic Procurement*. *E-Procurement* merupakan sebuah aplikasi internet untuk keperluan proses pengadaan. *E-Procurement* merupakan aplikasi internet untuk kegiatan pengadaan yang memungkinkan penyedia barang/jasa bisa memiliki katalog elektronik yang bisa mengakses berbagai data penyedia barang/jasa dan barang yang bisa dipasok.(Arsana, 2016)

Dalam kenyataannya, aplikasi *E-Procurement* bisa bermacam-macam dan masing-masing punya fitur yang berbeda. Jenis aktivitas yang didukung oleh internet juga berbeda-beda. Walaupun demikian, secara umum ada beberapa jenis aplikasi *E-Procurement* yaitu :

1. *E-catalogue*. Secara tradisional katalog biasanya tercetak dalam bentuk buku atau brosur. Dengan adanya internet, penyedia barang/jasa bisa memiliki katalog elektronik. Di sini penyedia barang/jasa mengumpulkan informasi supplier atau calon supplier dengan segala produk atau jasa yang mereka bisa pasok. *E-catalogue* biasanya dilengkapi dengan fasilitas pencarian (search) sehingga perusahaan akan dengan mudah mendapatkan informasi tentang produk atau jasa yang diinginkan.
2. *E-auction*. Ini adalah aplikasi untuk membantu proses lelang. Pada proses pembelian, lelang dilakukan oleh pembeli dengan mengumpulkan calon-calon supplier. Mereka sebelumnya sudah diberitahu oleh pembeli tentang jumlah, spesifikasi, dan waktu kebutuhan suatu barang atau jasa.
3. *Business to business market exchange*. Aplikasi ini memungkinkan banyak pembeli dan banyak penjual bertemu secara virtual. Pada kebanyakan kasus, aplikasi ini dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga.
4. *Business to business private exchange*. Aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu proses transaksi rutin dengan *supplier*. Perusahaan bisa mengirim *purchase order* secara elektronik, mengecek status pengi-

riman, melakukan transaksi pembayaran, dan sebagainya. ((I Putu Jati Arsana, 2016:32)

2.4 Kerangka Pikir

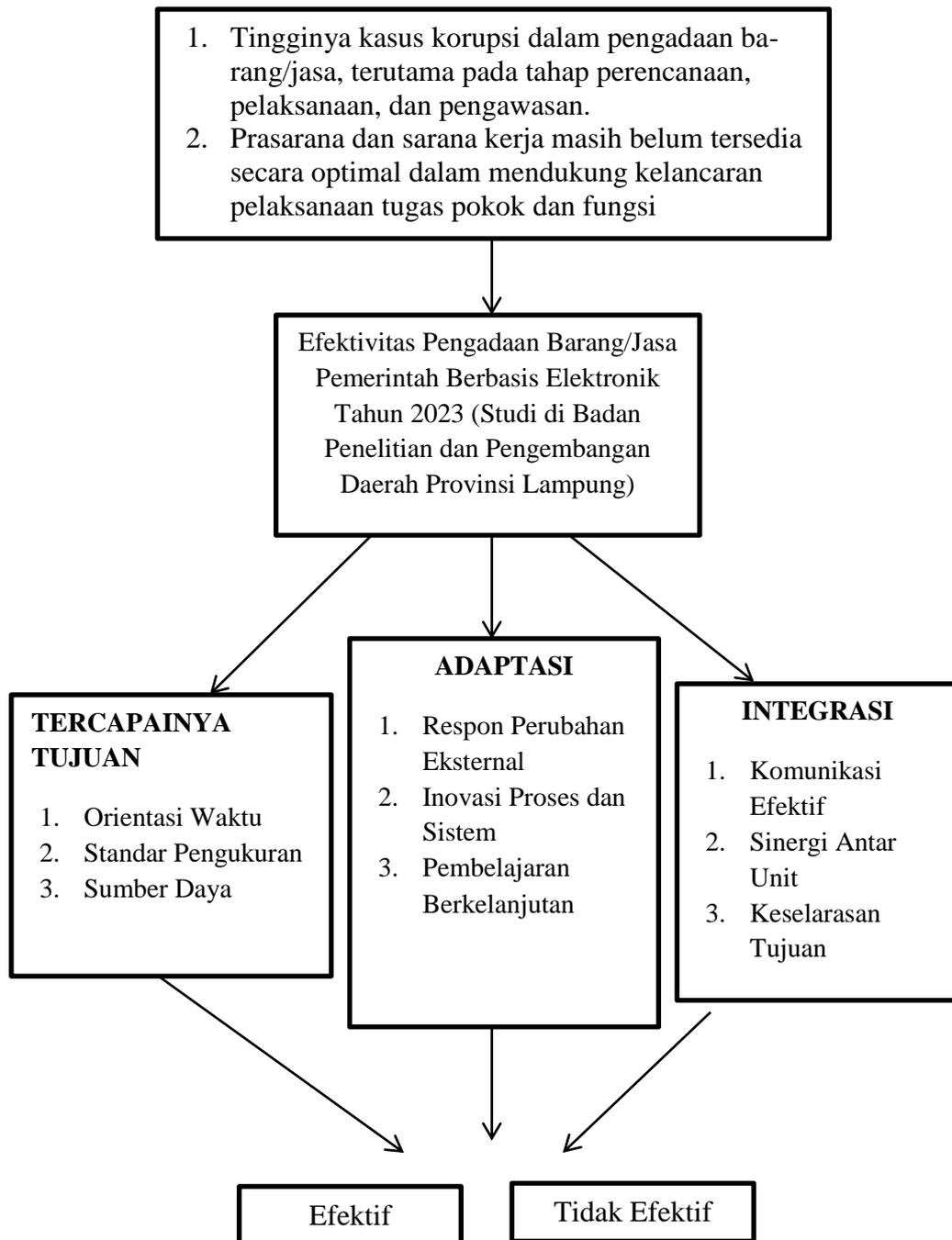
Era digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam sistem pengadaan barang/jasa. Sebagai komponen krusial dalam pelaksanaan program pemerintah, pengadaan barang/jasa memengaruhi efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah Indonesia mengembangkan sistem *E-Procurement* sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir kecurangan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan persaingan sehat antar penyedia barang/jasa. Namun, meskipun telah ada upaya digitalisasi, praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa masih terjadi, terutama akibat lemahnya regulasi, kapasitas SDM, dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *E-Procurement* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, mengingat instansi ini membutuhkan pengadaan yang efisien untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun melalui pendekatan sistemik, di mana efektivitas *E-Procurement* dilihat dari aspek regulasi, teknologi, sumber daya manusia, dan pengawasan. Regulasi seperti Perpres No. 12/2021 menjadi landasan hukum yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan penyederhanaan prosedur pengadaan. Sementara itu, infrastruktur teknologi dan kesiapan SDM menentukan kelancaran operasional sistem.

Proses implementasi *E-Procurement* meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, transparansi dalam penyusunan kebutuhan dan anggaran menjadi kunci untuk mencegah

penyimpangan. Selanjutnya, pelaksanaan lelang elektronik harus memastikan partisipasi yang adil dan kompetitif. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah praktik KKN. Efektivitas sistem ini diukur melalui indikator seperti efisiensi waktu dan biaya, kualitas barang/jasa yang diperoleh, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip pengadaan yang transparan dan kompetitif.

Dampak jangka panjang dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem *E-Procurement* di Balitbangda Provinsi Lampung. Dengan mengatasi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur TI dan kapasitas SDM, diharapkan pengadaan barang/jasa dapat berjalan lebih efisien dan mendukung kinerja penelitian. Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pengadaan yang bebas korupsi, sehingga mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas sistem yang ada, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah di era digital.



Gambar 1. Kerangka Pikir

(Diolah Peneliti, 2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Menurut Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill (2019) Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran akurat tentang orang, peristiwa, atau situasi. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan profil yang tepat dari seseorang, peristiwa, atau situasi. Pendekatan kualitatif menurut Creswell, J. W., & Poth (2018), merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang secara induktif dibangun dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data.

deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada penggambaran "apa yang ada" terkait dengan variabel atau kondisi dalam suatu situasi, menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, tanpa berusaha menjelaskan hubungan sebab-akibat. Metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dengan hasil akhir berupa deskripsi rinci tentang karakteristik orang, peristiwa, atau situasi tertentu. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, penelitian deskriptif memberikan landasan berharga bagi pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam skripsi "Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung" dapat dianggap tepat karena beberapa alasan yang saling terkait. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam dan pemahaman kontekstual tentang implementasi sistem berbasis teknologi dalam lingkungan spesifik lembaga tersebut. Pendekatan kualitatif memfasilitasi pengumpulan perspektif beragam dari berbagai stakeholder, memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan fokus penelitian, dan menghasilkan deskripsi yang kaya tentang proses pengadaan. Metode ini juga cocok untuk memahami kompleksitas topik, termasuk bagaimana kebijakan publik dan faktor-faktor lokal mempengaruhi efektivitas sistem. Dengan kemampuannya untuk menggali fenomena yang relatif baru dan memberikan pemahaman mendalam tentang proses implementasi, tantangan, dan keberhasilan, pendekatan kualitatif dapat mengungkapkan wawasan berharga tentang efektivitas sistem pengadaan berbasis teknologi yang mungkin sulit dicapai melalui pendekatan kuantitatif semata.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2017) fokus penelitian merupakan upaya peneliti untuk menentukan batasan-batasan yang jelas terhadap masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian berguna untuk mengarahkan penelitian pada permasalahan utama, sehingga peneliti tidak terlalu luas atau menyimpang dari topik yang telah ditetapkan. Hal ini juga membantu dalam merumuskan tujuan penelitian dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan serta menganalisis data yang relevan. Maka penelitian ini difokuskan kepada pencapaian efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi Lampung melalui pendekatan sasaran yang melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan *e-procurement* berdasarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran *e-procurement*. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan : hal ini dapat dilihat dari sejauh mana sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator :

- a. Berorientasi pada jangka waktu : analisis ketepatan waktu dalam seluruh proses *e-procurement* di Balitbanda Provinsi Lampung
 - b. Memiliki standar pengukuran yang jelas : mengevaluasi kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan standar *e-procurement* di Balitbanda Provinsi Lampung
 - c. Didukung sumber daya yang memadai : menganalisis ketersediaan dan kecukupan berbagai sumber daya pendukung sistem *e-procurement* di Balitbangda Provinsi Lampung
2. Integrasi : hal ini dapat dilihat dari Bagaimana koordinasi antara berbagai pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Indikator :

- a. Kemampuan merespon perubahan eksternal : menganalisis bagaimana Balitbangda Lampung beradaptasi dengan berbagai perubahan seperti regulasi *e-procurement* dari pemerintah pusat, perkembangan teknologi dalam sistem pengadaan elektronik, tuntutan transparansi dan efisiensi dari masyarakat, serta dinamika pasar dan vendor penyedia barang jasa.
- b. Inovasi dalam proses dan sistem : evaluasi pengembangan dan pembaruan dalam implementasi sistem *e-procurement* di Balitbangda Provinsi Lampung.
- c. Pembelajaran organisasi berkelanjutan : bagaimana organisasi melakukan transfer pengetahuan antar pegawai, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sistem, pengembangan kompetensi SDM, serta dokumentasi pembelajaran organisasi.

3. Adaptasi :

Sejauh mana sistem *e-procurement* ini mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan organisasi.

Indikator :

- a. Komunikasi yang efektif : bagaimana proses pertukaran informasi dilakukan dalam sistem *e-procurement*, baik antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan vendor, maupun komunikasi antar unit internal Balitbangda.
- b. Sinergi antar unit : bagaimana koordinasi dilakukan antara unit perencanaan, pelaksana, serta pengawasan dan evaluasi dalam sistem pengadaan elektronik.
- c. Keselarasan tujuan individu dan organisasi : pemahaman pegawai terhadap tujuan dan manfaat sistem pengadaan elektronik, serta peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut.

3.3 Informan

Dalam penelitian kualitatif, sumber data disebut dengan informan, penentuannya tidak diambil secara random, tetapi diambil purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu.

Menurut Sugiyono (2014) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Tabel 3. Informan Peneliti

No	Nama	Pekerjaan
1	Sultan Hasanuddin	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balitbangda Provinsi Lampung
2	Dian Sera Fauzela	Penanggungjawab Pengadaan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3	Meira Mutiara Dona	Penanggungjawab Pengadaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
4	Nia Kurniati	Penanggungjawab Pengadaan Bidang Umum dan Kepegawaian
5	Putri Kartarina	Penanggungjawab Pengadaan Bidang Penguatan Inovasi dan Strategi Kebijakan Daerah
6	Syahlely Agustiana	Penanggungjawab Pengadaan Bidang Aset dan Keuangan
7	Yusuf Ananda	Penyedia Barang
8	Senna Sulaiman	Penyedia Barang

(sumber : Diolah oleh peneliti)

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung karena data ataupun dokumen-dokumen dapat diperoleh di Balitbangda dan untuk mengetahui efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik harus terjun langsung ke Balitbangda, penelitian ini direncanakan akan berlangsung satu bulan

3.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yaitu :

- a. Data Primer, Menurut Nazir (2014) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pertama oleh peneliti untuk tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui berbagai metode seperti wawancara atau observasi, dan biasanya bersifat spesifik untuk masalah atau pertanyaan penelitian yang sedang diteliti.

Tabel 4. Keterangan Pengambilan Data Primer

No.	Nama Informan	Instrumen	Waktu
1.	Sultan Hasanudin, S.Si	Wawancara	20 Januari 2025
2.	Dian Sera Fauzela, S.Si	Wawancara	20 Januari 2025
3.	Meira Mutiara Dona, S.Kom	Wawancara	23 Januari 2025
4.	Nia Kurniati, S.E., M.M.	Wawancara	23 Januari 2025
5.	Putri Kartarina, S.Sos., M.M.	Wawancara	30 Januari 2025
6.	Syahlely Agustiana, S.E., M.M.	Wawancara	30 Januari 2025
7.	Yusuf Ananda, S.E.	Wawancara	3 Februari 2025
8.	Senna Sulaiman	Wawancara	3 Februari 2025

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dan sebelumnya dikumpulkan oleh pihak atau organisasi lain, kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk keperluan penelitian. Data ini tidak diambil peneliti secara langsung dari sumber primernya melainkan dari berbagai sumber yang ada seperti laporan, publikasi, arsip, statistik atau penelitian terdahulu (Ibid)

Tabel 5. Keterangan Pengambilan Data Sekunder

No	Keterangan Informasi Data Sekunder	Sumber data	Waktu Pengambilan Data Sekunder
1.	Rekap Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2023	Balitbangda Provinsi Lampung	16 Oktober 2024
2.	Perka LKPP No.4 Tahun 2024	Balitbangda Provinsi Lampung	25 November 2024
3.	Renstra Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2025-2026	Balitbangda Provinsi Lampung	25 November 2024
4.	Laporan Realisasi Anggaran 2022-2023	Balitbangda Provinsi Lampung	10 Desember 2024

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang umum digunakan, khususnya dalam penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan informasi dari responden atau informan melalui dialog langsung. Dengan wawancara terstruktur, peneliti menggunakan panduan atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dan seluruh responden diberikan pertanyaan yang sama. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang bisa dibandingkan antarresponden (Sugiyono, 2016)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelitian atau pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi tersebut dapat berupa catatan tertulis, laporan, surat, foto, rekaman video, dan lain-lain. Moleong (2017): Menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, dokumen digunakan sebagai data pelengkap untuk memberikan konteks yang lebih kaya terhadap fenomena yang sedang diteliti. Moleong juga menambahkan bahwa dokumen bisa memberikan informasi historis, kebijakan, atau keputusan yang relevan untuk memahami konteks penelitian secara lebih mendalam.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data dari lapangan, peneliti akan mengolah data yang dihasilkan. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data adalah proses meninjau dan memilih data yang dikumpulkan untuk memastikan siap untuk dianalisis (Sugiyono, 2016).

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan:

- a. **Konsistensi:** Tidak ada inkonsistensi dalam tanggapan atau jawaban yang diberikan responden. Data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen) dibandingkan untuk melihat apakah terdapat konsistensi antara hasil dari berbagai teknik pengumpulan data. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, peneliti perlu memeriksa ulang untuk menemukan sumber perbedaan tersebut.
- b. **Selesai:** Semua pertanyaan telah terjawab atau semua informasi yang diperlukan telah dikumpulkan. Peneliti akan memeriksa setiap hasil wawancara untuk memastikan bahwa semua pertanyaan telah dijawab dengan lengkap dan relevan.
- c. **Akurasi:** Memeriksa kesalahan atau kekurangan data, seperti data yang tidak konsisten atau tidak relevan. Jika ditemukan data yang tidak lengkap atau mencurigakan, peneliti dapat melakukan klarifikasi atau meminta informasi tambahan dari responden. Misalnya, jika ada jawaban yang tidak konsisten atau jawaban yang tidak logis, peneliti perlu mengecek ulang data tersebut.

2. Interpretasi Data

Interpretasi adalah proses menganalisis data yang telah diedit dan disiapkan untuk memahami maknanya dalam konteks penelitian. Interpretasi melibatkan pemahaman data sehingga peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan. (Moleong, 2017)

Tahapan interpretasi antara lain :

- a. **Pengelompokan Data:** Mengelompokkan data berdasarkan dimensi yang diteliti (tujuan, integrasi, adaptasi).
- b. **Penafsiran Hasil Kualitatif:** Peneliti akan menganalisis tema-tema yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- c. Penghubungan dengan Teori: Peneliti akan menghubungkan temuan dengan teori Duncan yang menjadi kerangka acuan, untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dievaluasi berdasarkan teori tersebut.
- d. Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil interpretasi data yang menunjukkan sejauh mana *e-procurement* efektif di Balitbangda Provinsi Lampung.

3.8 Teknik Analisis Data

Creswell (2014) menyatakan bahwa analisis data adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengorganisir dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan makna terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan analisis dua model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018) yaitu :

- a. Reduksi Data: Merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pengubahan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang dianggap tidak relevan disaring untuk memudahkan peneliti dalam proses analisis selanjutnya.
- b. Penyajian Data (Data Display): Penyajian data bertujuan untuk menampilkan data secara terorganisir agar peneliti dapat memahami alur informasi dan memutuskan tindakan yang perlu dilakukan. Penyajian data dapat berupa narasi, matriks, grafik, atau diagram.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Kesimpulan ditarik secara tentatif selama proses pengumpulan data berlangsung dan akan diverifikasi dengan mengecek kembali apakah data konsisten atau memerlukan perbaikan. Kesimpulan akhir adalah hasil dari proses analisis data secara keseluruhan.

3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong (2017:331), triangulasi sumber merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Dalam triangulasi sumber, peneliti melakukan perbandingan dan pengecekan balik terhadap derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Proses ini dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, serta membandingkan perspektif satu informan dengan informan lainnya. Selain itu, triangulasi sumber juga mencakup perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data yang diperoleh.

Sementara itu, triangulasi metode menurut Moleong (2017:331) dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Triangulasi metode bertujuan untuk melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda, atau melakukan pengecekan terhadap beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan dapat dipercaya melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi secara bersamaan, sehingga dapat meminimalisir bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik tahun 2023 di Balitbangda Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa sistem *e-procurement* yang ada di Balitbangda Provinsi Lampung secara keseluruhan telah Efektif dengan diukur melalui tiga indikator utama: pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi.

Pada indikator pencapaian tujuan, sistem *e-procurement* telah berhasil menjadi katalisator dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Hal ini tercermin dari peningkatan struktur, ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, Balitbangda mampu mengoptimalkan sumber daya melalui pemilihan metode pengadaan yang tepat dan penggunaan e-katalog versi 5.0 sesuai SOP. Mekanisme verifikasi yang ketat, sistem denda, dan pengawasan real-time telah berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan kapasitas SDM, distribusi pengetahuan yang belum merata, ketergantungan pada proses manual untuk beberapa dokumen, serta keterbatasan infrastruktur TI yang perlu mendapat perhatian.

Dari aspek adaptasi, Balitbangda menunjukkan kemampuan yang baik dalam merespon perubahan eksternal melalui peran strategis PPK dan dukungan sistem *e-procurement*. Institusi melakukan pembaruan sistem secara rutin setiap 6 bulan dengan fitur-fitur inovatif seperti notifikasi otomatis, revisi dokumen online, dan integrasi dengan SIMDA Keuangan. Program pembelajaran

berkelanjutan telah dijalankan secara sistematis melalui pelatihan rutin, mentoring, sharing session, dan workshop. Kendala yang masih dihadapi meliputi masalah teknis seperti error upload dan lambatnya server, serta kompleksitas fitur yang menghambat pengguna baru.

Pada indikator integrasi, implementasi pengadaan elektronik telah membangun keterhubungan yang baik antar komponen organisasi melalui pendekatan multi-saluran dalam komunikasi, mekanisme koordinasi terstruktur, dan pemahaman bersama tentang tujuan sistem. Masing-masing bidang telah mengembangkan strategi koordinasi sesuai karakteristiknya dalam koridor sistem terintegrasi. PPK berhasil menjembatani perbedaan prioritas antar unit melalui rapat koordinasi rutin dan penggunaan sistem *e-procurement* sebagai platform terpusat. Tantangan yang dihadapi meliputi kendala teknis seperti overload server dan kebutuhan pelatihan berkelanjutan untuk optimalisasi penggunaan fitur.

Secara keseluruhan, efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik di Balitbangda Provinsi Lampung tahun 2023 telah mencapai tingkat yang baik dengan berbagai capaian positif pada ketiga indikator yang dianalisis. Untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, diperlukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan komprehensif, desentralisasi pengetahuan dan tanggung jawab pengadaan, peningkatan infrastruktur pendukung, penyempurnaan sistem *e-procurement* untuk digitalisasi penuh, serta penguatan mekanisme feedback dan evaluasi yang melibatkan seluruh stakeholder. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, Balitbangda dapat memaksimalkan manfaat sistem *e-procurement* untuk mendukung tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung tahun 2023, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan *e-procurement* di masa yang akan datang.

Pertama, kepada Balitbangda Provinsi Lampung disarankan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan, khususnya dalam aspek penguasaan teknis penggunaan sistem *e-procurement*. Pelatihan secara berkala perlu diberikan kepada seluruh pegawai yang terlibat, tidak hanya terbatas pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau staf teknis, agar terjadi pemerataan pemahaman dan keterampilan dalam pengoperasian sistem. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antardivisi atau unit kerja dalam rangka menciptakan sinergi yang lebih baik dalam setiap tahapan pengadaan. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai juga menjadi hal penting untuk mendukung kelancaran operasional, terlebih bagi bidang yang masih mengalami kendala teknis dalam menjalankan sistem *e-procurement*. Balitbangda juga perlu mengembangkan sistem evaluasi dan dokumentasi internal secara digital sebagai bagian dari pembelajaran organisasi. Hal ini bertujuan agar setiap pengalaman dan kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi referensi untuk perbaikan di masa mendatang.

Kedua, kepada Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan memberikan dukungan penuh, baik secara kebijakan maupun anggaran, kepada Balitbangda dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pemerintah provinsi perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan program pengadaan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga disarankan untuk menyusun regulasi atau kebijakan yang mendorong percepatan implementasi *e-procurement* secara menyeluruh

di seluruh perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengadaan elektronik juga sangat penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga, untuk peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan studi komparatif mengenai efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik pada lembaga atau perangkat daerah lainnya, sehingga dapat ditemukan pola umum maupun spesifik dalam implementasi *e-procurement* di tingkat pemerintah daerah. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif (*mix-method*) guna memperkuat generalisasi hasil dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, aspek teknis dari sistem *e-procurement*, termasuk peran serta penyedia dalam keseluruhan proses pengadaan, juga penting untuk diteliti lebih mendalam agar efektivitas sistem dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. (2018). *Modul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Amiruddin, A. (2021). *Tantangan dan Strategi Implementasi E-Procurement di Sektor Pemerintahan*. Penerbit Alfabeta.
- Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156–172. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.26>
- Arsana, I. P. J. (2016). *Electronic Government: Strategi Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sektor Publik*. Andi Offset.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Duncan, R. D. (2012). *Change-Friendly Leadership: How to Transform Good Intentions into Great Performance*. Maxwell Stone Publishing.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2014). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Salemba Empat.
- Hikmah, R. N., & Irjayanti, M. (2023). Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (E-Procurement) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. *Review of Accounting and Business*, 3(2), 133–152. <https://doi.org/10.52250/reas.v3i2.602>
- Indrajit, R. E. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Era Digital*. Gramedia.
- Iwan Irwansyah, I. I., Zahran, W. S., & Lase, R. (2022). Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E- Procurement) Di Kelurahan Cakung Barat. *MANABIS: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 250–258. <https://doi.org/10.54259/manabis.v1i3.1053>
- Kathryn, B., & Rohendi, H. (2019). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1357–1366.

Kementrian PANRB. (2016). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). *Digitalisasi Sistem Pengadaan : Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju*. <https://www.lkpp.go.id/read/bu/digitalisasi-sistem-pengadaan-transformasi-pengadaan-untuk-indonesia-maju>

Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.109>

Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nayabarani, S. D. (2017). Article 5 12-30-2017 Part of the Administrative Law Commons, Other Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Nayabarani. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1586>

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Perpres Nomor 12. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Republik Indonesia*, 086130, 1–47.

Purwanto, A. (2020). *Evaluasi Sistem E-Procurement dalam Mendukung Penelitian dan Pengembangan di Sektor Pemerintahan*. Penerbit Bumi Aksara.

Robbins, S. P. (2013). *Organizational Behavior* (15th ed.). Pearson Education, Inc.

Saksono, P. B. (1984). *Manajemen Efektivitas Organisasi: Teori dan Praktik*. Penerbit Erlangga.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students* (8th ed.). Pearson Education Limited.

- Steers, R. (2015). *Efektivitas Organisasi: Suatu Tinjauan*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Umar, Z., Suadi, S., & Rasyidin, R. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement Di Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5733>
- Wibowo, A. (2019). *Reformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel*. Penerbit Andi.
- Wibowo, R. (2019). *E-Procurement: Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik*. Surabaya: Penerbit Nasional.
- Zulkarnain. (2012). *Efektivitas dan Efisiensi dalam Organisasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.